UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**IMPLIKASI PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TERHADAP JAMINAN HAK KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL**
KRISTINA VIRI, Andy Omara, S.H., M.Pub&IntLaw., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implikasi pengujian konstitusional Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Beberapa kesimpulan yang diambil dari penulisan ini antara lain: 1) Jika dilihat dari konstruksinya, Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013 adalah putusan atas pengujian Undang-Undang dimana Hakim melakukan penafsiran terhadap Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945. Jenis penafsiran yang dilakukan oleh hakim adalah penafsiran historis dan teleologis. 2) Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013 mengikat sebagai Undang-Undang sejak dibacakan. Berdasarkan teori hierarki perundang-undangan keberadaan putusan dimenangkan pemberlakuannya dibandingkan peraturan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan putusan ini. Namun demikian, untuk memastikan keabsahan pertentangan peraturan tersebut diperlukan mekanisme pengujian salah satunya di lembaga yudikatif. 3) Pengaturan terhadap organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta prinsip negara hukum yang demokratis adalah pengaturan dengan pendekatan hukum (dan bukan politik). Dimana pengaturan Ormas kembali pada pengaturan badan hukum: yaitu badan hukum yayasan dan perkumpulan.

Kata Kunci: Implikasi, Pengujian Konstitusional, Undang Undang Ormas, Hak berserikat dan berkumpul

ABSTRACT

This study analyzes the implications of constitutional review of Law Number. 17 of 2013 concerning Societal Organizations using a conceptual and statutory regulations approach. Some conclusions drawn from this writing include: 1) When viewed from the construction point of view, Decision Number 82/PUU-XI/2013 is a decision on the judicial review of the Law to Constitution, in which the Judge interprets Article 28 and Article 28 E paragraph (3) of the 1945 Constitution. The interpretation carried out by the judge is a historical and teleological interpretation. 2) Decision Number 82/PUU-XI/2013 is binding as Law since it was read out. Based on the hierarchical theory of legislation, the enforcement of the decision wins compared to the regulations under the Act that contradict with this decision. However, to ensure the validity of the conflicting regulations, it is necessary to conduct Judicial Review. 3) To regulate the societal organization in accordance with the principles of freedom of association and assembly and the principles of a democratic rule of law is with a legal (and not political) approach. Where the regulation of Societal Organization returns to the regulation of legal entities: foundations and associations.

Keywords: *Implication, Constitutional Review, Ormas Law, Right to Association and Assembly*